

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wa Barakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Kalurahan Margokaton yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan karuniaNya sehingga tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Margokaton Tahun 2024.

Penyusunan dan penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini merupakan pemenuh dari tanggung jawab kami sebagai Lurah kepada masyarakat Kalurahan Margokaton dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2024. Informasi Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan ini juga merupakan kewajiban Lurah dalam Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Lurah, dimana Lurah Wajib memberikan dan/atau menyebarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dalam hal ini media cetak.

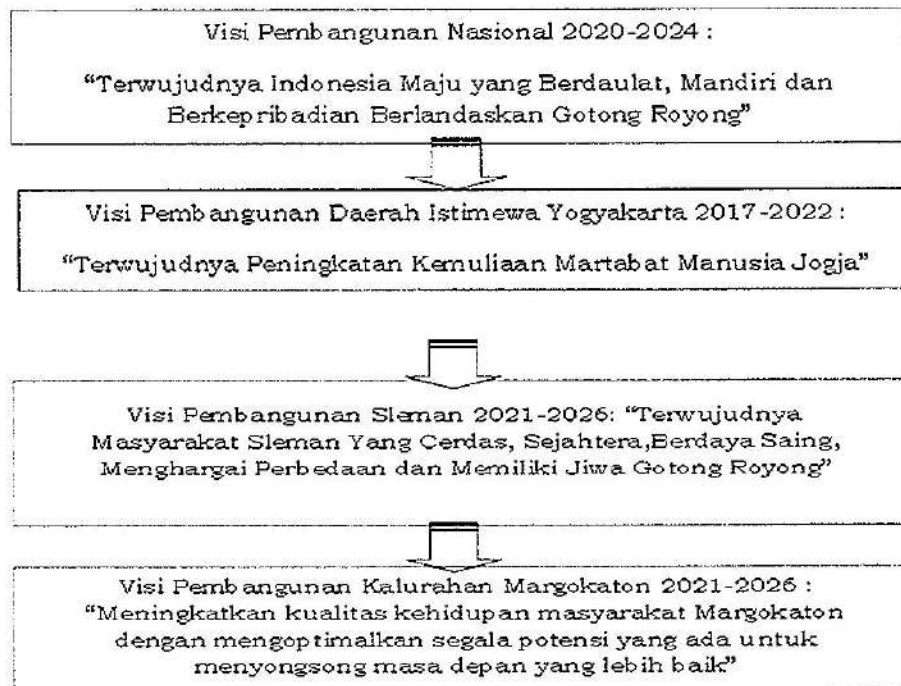
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Visi juga merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan kalurahan yang ingin dicapai dalam masa 6 (enam) tahun mendatang. Visi harus menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam pencapaian rencana jangka menengah kalurahan. Perumusan visi pada umumnya menjawab pertanyaan tentang akan menjadi apa suatu organisasi dan lembaga (what do we want to become?). Visi ini merupakan abstraksi dari bentuk akhir suatu cita-cita yang diupayakan untuk diwujudkan. Tentunya hal ini mempertimbangkan beberapa sumber daya dan kondisi kewilayahan. Visi Lurah Margokaton periode 2022-2027 adalah:

"Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Margokaton dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk menyongsong masa depan yang lebih baik."

Visi Pemerintah Kalurahan Margokaton berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Kedua, Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja", Visi Pembangunan Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024 Kabupaten Sleman yaitu "Terwujudnya

Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”

Keterkaitan yang dimaksud diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1.1 Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, RPJM Kabupaten Sleman dan RPJMKal

b. Misi

Misi adalah penjabaran dari visi dan disusun dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi dibuat dalam proses tahapan ingin mencapai sebuah visi yang secara kompleks akan tercapai apabila semua tahapan dan rumusan penyusunan kebijakan dimisi telah terlaksana dengan baik dan lancar. Rumusan misi dibuat dengan memperhatikan factor- faktor lingkungan yang strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan kalurahan. Misi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, pada implementasinya diwujudkan dalam beberapa aspek diantaranya meliputi :

1. Pertama, Aspek Perencanaan, didalam UU Desa pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi Pemerintah Kalurahan/Lurah untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka menyusun visi bersama membangun Kalurahan antara Masyarakat dan Pemerintahan Kalurahan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam Dokumen Jangka menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
2. Kedua, Aspek Penganggaran, Perencanaan dan penganggaran Keuangan Kalurahan merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBKal) pada

hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap Kalurahan akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, hal ini merupakan modal finansial bagi Kalurahan dalam upaya mewujudkan visinya.

3. Ketiga, Aspek Pelaksanaan, Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Kalurahan. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Kalurahan dilaksanakan sendiri oleh Kalurahan. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Kalurahan diinformasikan kepada Pemerintah Kalurahan untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Kalurahan. Partisipasi, gotong royong, dan peran aktif masyarakat menjadi kata kunci dalam upaya mencapai visi, dan hal ini memerlukan sentuhan seni kepemimpinan kades untuk menggaling dukungan dari masyarakat tersebut.
4. Keempat, Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka progres kegiatan, capai target, dalam upaya menjalankan visi dan misi Kalurahan perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah Kalurahan sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPKal dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut pada tahun 2023 telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kewenangan desa yang dilaksanakan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, dan dianggarkan dalam Peraturan Kalurahan Margokaton Nomor 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dan Peraturan Kalurahan Margokaton Nomor 2 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Pencapaian visi dan misi tersebut secara bertahap telah tertuang dan terwadahi dalam 4 (empat) bidang kewenangan yang telah dilaksanakan pemerintah kalurahan tahun 2024 yaitu sebagai berikut ;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

Bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui beberapa kegiatan;

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan secara non tunai yang meliputi penghasilan tetap Lurah Desa,

tunjangan jabatan Lurah Desa, tunjangan suami/ istri Lurah Desa, tunjangan anak Lurah Desa dan tunjangan kinerja Lurah Desa. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 78.225.000,00 dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 77.790.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi Lurah. Dengan disediakan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa diharapkan membantu memotivasi kinerja Lurah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan dilingkungan Desa/ Kalurahan Margokaton.

- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan pamong desa dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan secara non tunai dan tunai yang meliputi penghasilan tetap pamong desa; tunjangan jabatan pamong desa; tunjangan suami/ istri pamong desa; tunjangan anak pamong desa; dan tunjangan kinerja pamong desa, staf desa dan staf honorer desa. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 824.833.000,00 dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 815.064.000,00. Sasaran kegiatan dalam kegiatan ini meliputi Carik, Jogoboyo, Kamituwo, Ulu-ulu, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta dan 12 Dukuh se-Margokaton yang totalnya ada 12 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pamong desa/ kalurahan. Dengan disediakan penghasilan tetap dan tunjangan pamong membantu memotifasi kinerja pamong kalurahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pamong dilingkungan Desa/ Kalurahan Margokaton. Pemerintah Kalurahan diberikan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan kalurahan, tunjangan-tunjangan serta tanah pelungguh. Jumlah Pamong Kalurahan Margokaton terdiri dari 1 Carik, 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi, 12 Dukuh.
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan. Jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa meliputi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 35.680.000,00 dengan nilai realisasi anggaran Rp. 35.642.439,36. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan ketenagakerjaan bagi Lurah, pamong kalurahan, staf kalurahan. Dengan adanya iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan hari tua dan jaminan ketenagakerjaan bisa memberikan rasa tenteram dan sejahtera bagi Lurah, pamong kalurahan, staf kalurahan
- d. Operasional Perkantoran Kalurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan kalurahan dengan bentuk penyediaan keseluruhan kebutuhan rutin kalurahan, pengadaan barang modal perkantoran, pemberian tunjangan bendahara kalurahan, pengurus asset kalurahan serta pemeliharaan asset kalurahan. Anggaran untuk kegiatan ini Rp 128.500.000,00 dengan nilai realisasi anggaran Rp 106.804.229,00. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan penyediaan operasional kantor adalah seluruh pamong kalurahan dan staf kalurahan serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Margokaton. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan kelengkapan operasional pemerintah desa/ kalurahan, mempermudah untuk pelayanan masyarakat dalam kantor desa/ kalurahan maupun di luar kantor desa/ kalurahan.

Dengan kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan masyarakat dan memberikan kesejahteraan pamong dan masyarakat desa/ kalurahan

- e. Penyediaan Tunjangan BPD Kegiatan penyediaan tunjangan BPD dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan secara non tunai yang meliputi tunjangan kedudukan BPD dan tunjangan kinerja BPD. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 89.050.000,00 dengan nilai realisasi anggaran Rp. 89.050.000,00. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan penyediaan tunjangan BPD ini adalah anggota BPD Margokaton yang berjumlah 7 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa Margokaton. Dengan kegiatan penyediaan tunjangan BPD ini diharapkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa akan lebih baik lagi dan lebih semangat dalam bertugas.
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll) Kegiatan penyediaan operasional BPD dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan yang terdiri dari belanja barang perlengkapan dan belanja perjalanan dinas. Belanja barang perlengkapan meliputi belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja barang cetak dan penggandaan, belanja barang konsumsi (makan minum) dan belanja pakaian dinas/ seragam/ atribut. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 16.204.000,00 dengan nilai realisasi anggaran Rp. 13.622.000,00. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan penyediaan operasional BPD ini adalah anggota BPD Desa/ Kalurahan Margokaton yang berjumlah 7 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kegiatan BPD baik untuk rapat ataupun kegiatan lainnya dan juga terjaminnya ketersediaan alat tulis dan sarana lainnya. Diharapkan dengan adanya fasilitas operasional ini memperlancar kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD.
- g. Pembayaran Insentif RT/RW, dimana sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah RT ada 57 dan RW 25 .Pertemuan dilaksanakan dengan RT/RW dengan pemerintah Kalurahan dilaksanakan pada kunjungan dalam rangka musyawarah pembangunan padukuhan maupun pertemuan-pertemuan yang diadakan dikalurahan guna menjalin komunikasi dan menyampaikan informasi terkait dengan pemerintahan kalurahan. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 49.200.000,00 dengan nilai realisasi anggaran Rp. 49.200.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada RT/RW. Bahwa dengan adanya fasilitasi untuk RT memberikan penghargaan tersendiri untuk kinerja RT/RW. RT/RW membutuhkan dorongan moril dan materil dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk pemberian insentif itu sendiri dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- h. Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pamong kalurahan dilaksanakan pembinaan rutin mingguan sebagai sarana untuk koordinasi dan penyampaian informasi penting dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan masing-masing pelaksanaan teknis dan sekretaris. Selain narasumber dari Lurah, dalam pelaksanaan



pembinaan Pamong kalurahan juga dengan mendatangkan narasumber dari Kapanewon maupun dari kabupaten

- i. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kalurahan juga



dilakukan kegiatan musyawarah atau rembug warga. Penyusunan RKP Kalurahan dilakukan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Sebagai



bentuk pertanggung jawaban disusun pula laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kepada BPKal serta memuat informasi penyelenggaraan pemerintah kalurahan ke media cetak. Penyusunan RPJMKal dilakukan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan selama enam tahun yakni tahun 2022 s/d 2027 yang selanjutnya

dijabarkan pada tiap-tiap tahun anggaran sesuai skala prioritas kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)

- j. Penyusunan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan. Pada tahun 2024 jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp 5.459.104.350,00 dengan jumlah realisasi belanja Rp 5.492.359.409,00 , jumlah surplus/(defisit) Rp. 344.535.592,44 dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 626.597.948,11 sehingga terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 626.597.948,11.
- k. Dalam menata asset pemerintah kalurahan dalam rangka peningkatan pendapatan asli kalurahan dilaksanakan pengelolaan asset kalurahan, antara lain dengan inventarisasi tanah kalurahan, penataan tanah kas kalurahan, penyelesaian belanja tanah pengganti untuk tanah kalurahan dan juga penegasan batas tanah-tanah kalurahan
- l. Dalam rangka tugas pembentukan pencapaian pelunasan pajak bumi dan bangunan, dilaksanakan kegiatan intensifikasi PBB, fasilitasi pekan pembayaran PBB dan juga update data PBB yang dilakukan disetiap padukuhan. Capaian pelunasan PBB di Kalurahan Margokaton tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah SPPT	Jumlah Pajak Terutang (Rp)	Realisasi		%	Terhutang	
		SPPT	Jumlah (Rp)		SPPT	Jumlah (Rp)
6.420	158.777.306	6.420	155.147.379	100%	0,00	0,00

- m. Guna memberikan pemahaman tentang peraturan yang dibuat kalurahan, dilaksanakan sosialisasi peraturan kalurahan kepada tokoh masyarakat. Peraturan kalurahan yang

disosialisasikan antara lain SOTK kalurahan, APBKalurahan, dan peraturan-peraturan lain diatasnya yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada warga masyarakat.

- n. Dalam penyusunan regulasi ditingkat kalurahan pemerintah kalurahan bersama BPKal telah menetapkan program legislasi kalurahan untuk dibahas pada tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah peraturan kalurahan yang ditetapkan sebanyak 4 peraturan kalurahan. Sedangkan dalam bentuk peraturan Lurah sebanyak 4 peraturan lurah dan dalam bentuk keputusan Lurah sebanyak 30 keputusan Lurah
- o. Pemerintah Kalurahan Margokaton selalu tranparan dalam setiap penggunaan anggaran, hal itu direalisasikan dengan pemasangan banner APBKal maupaun Laporan APBKal di setiap papan informasi padukuhan dan di halaman kantor kalurahan
- p. Pada tahun 2024 dilaksanaan pengisian pamong kalurahan yang kebetulan pada tahun



2024 pensiun yaitu Dukuh Seyegan. Pada pengisian pamong ini diikuti 3 Calon dari padukuhan Seyegan, dan setelah itu diadakan seleksi oleh STPMD APMD dihasilkan dengan nilai tertinggi adalah Fajariyanto dari Padukuhan Seyegan sebagai calon dukuh terlantik.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan dalam sekup Pemerintahan Kalurahan merupakan hal yang sangat penting menuju pada terwujudnya pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam arti luas pada umumnya dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan yang meliputi prasarana perhubungan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan budaya dimana didalam pelaksanaannya dipenuhi melalui bantuan pemerintah maupun secara swadaya murni oleh masyarakat. Bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan :

- a. Guna meningkatkan prasarana transportasi yang lebih nyaman kepada warga, dilakukan pembangunan jalan dengan pengaspalan, pengerasan, maupun cor jalan yang berlokasi di Margokaton. Dari tahun ke tahun kondisi jalan desa akan terus lebih baik dengan usaha pembangunan, peningkatan, maupun dengan pemeliharaan jalan :
 - Pengaspalan jalan dilaksanakan di padukuhan Grajegan:



- b. Selain itu ada pula pembangunan drainase yang berlokasi di Lapangan Kalurahan Margokaton



- c. Adapun kegiatan pembangunan lain yaitu pemeliharaan saluran Irigasi tersier yang berlokasi di padukuhan Susukan 2. Guna memperlancar saluran irigasi dan saluran air hujan di wilayah maka sangat perlu dilakukan pembangunan saluran irigasi maupun gorong-gorong. Begitu pula untuk menahan erosi, pembangunan talud di beberapa titik sangat diperlukan.



- d. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani juga dilakukan di padukuhan Susukan II. Perkerasan jalan usaha tani ini dilakukan agar memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian.



- e. Gorong-gorong merupakan sebuah saluran air yang dibuat untuk mengalirkan air hujan agar daerah tersebut tidak menjadi banjir karena genangan air. Pekerjaan gorong-gorong bertujuan untuk mengurangi debit air sehingga terhindar dari banjir. Selain menggunakan beton precast, penggunaan dapat dilakukan cor di tempat dengan bantuan mobil mixer atau molen untuk memberikan kualitas cor yang baik.
- f. Selain pembangunan jalan usaha tani padukuhan Seyegan juga telah melaksanakan pembangunan jalan pemukiman



- g. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Rumah Tidak



Layak Huni yang belum layak yang ada di Margokaton pun menjadi sasaran program pembangunan pada tahun ini, sehingga masyarakat benar-benar memiliki Rumah Layak Huni yang bersih dan sehat . dengan adanya bantuan untuk Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak Huni

sehingga bisa merasakan taraf kehidupan yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan social di lingkungan sekitar. Sehingga dengan adanya Rehabilitasi RTLH ini dapat meningkatkan hubungan yang baik anatar pemerintah dan masyarakat pada umumnya.



- h. Adapun kegiatan lain, berupa pemeliharaan dan rehabilitasi Pagar Lapangan yang berlokasi di Margokaton. Program kegiatan ini berasal dari sumber dana APBN dengan jumlah anggaran Rp 40.860.500,00.



- i. Di kegiatan pertanian dibangun irigasi dengan maksud memperlancar arus air dan mengurangi air terbuang, selain itu juga digunakan untuk mendukung usaha perikanan warga desa di padukuhan.
- j. Selain kegiatan yang bersifat fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa juga dilaksanakan kegiatan yang bersifat non fisik yaitu :

- Sub bidang kegiatan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

-Penyelenggaraan PAUD



- Sub bidang kegiatan kesehatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Posyandu Balita di 13 Posyandu.



- Posyandu Lansia



- Pembinaan dan pengelolaan PAUD, Posyandu, Poskesdes, Polindes dan fasilitasi kader. Pembinaan dan pengelolaan Posyandu diberikan dalam bentuk uang pembelian makanan tambahan. Pembelian alat-alat Posyandu, dan insentif Kader Posyandu. Jumlah kader posyandu sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 130 orang, dan kader kesehatan 15 orang, serta kader KB sebanyak 15 orang.
- k. Pada kegiatan kesehatan juga ada kegiatan seperti dilaksanakannya penyelenggaraan posyandu, yang melakukan kegiatan kelas ibu hamil. Kegiatan kelas ibu hamil ini dilaksanakan di kantor Kalurahan Margokaton
- l. Tak hanya itu, pada kesehatan pun juga ada beberapa kegiatan lain yaitu adanya



penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan yang dialokasikan sebanyak Rp 23.400.000 yang bersumber dari Dana Desa.

- m. Selain adanya kegiatan pendidikan adapun kegiatan lain pada kegiatan kesehatan, yaitu rebug stunting.



- n. Program yang terlaksana adalah pembuatan Baliho Informasi di setiap Padukuhan untuk memberikan informasi ke semua warga Margokaton tentang APBKal baik rencana



3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Bidang pembinaan Kemasyarakatan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui kegiatan :

- Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban kalurahan dilakukan kegiatan jaga warga dan kunjungan ke padukuhan pada malam hari saat ada kegiatan ronda di masyarakat yang dilakukan oleh Lurah dan Perangkat yang didampingi juga oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di Kalurahan Margokaton serta anggota Linmas dengan tujuan untuk memotivasi warga untuk melaksanakan siskamling di wilayahnya masing-masing.
- Pembinaan kelompok seni budaya dan pengembangan seni budaya lokal, melalui kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kalurahan, gelar potensi kalurahan. Gelar potensi kalurahan dilaksanakan bersamaan acara merti kalurahan, dimana dalam gelar potensi kalurahan ini menampilkan masing-masing potensi potensi. Dalam acara ini dapat menarik perhatian warga kalurahan setempat dan sekitarnya dan dapat mendorong transaksi ekonomi lokal pedesaan. Peringatan hari jadi Sleman, dilaksanakan sebagai wujud penghormatan dan handarbeni terhadap Kabupaten Sleman. Peringatan ini dilakukan dengan pengiriman bregade untuk mengikuti upacara di Kabupaten.
- Pembinaan rois, sebagai salah satu unsur masyarakat peran rois masih sangat vital



dalam penyelenggaraan urusan dan upacara keagamaan Islam. Pemerintah kalurahan juga memberikan perhatian dengan memberikan pembinaan dan pelatihan dengan mendatangkan narasumber dari berbagai instansi. Selain itu untuk memberikan penghargaan kepada peran rois,

setiap tahunnya diberikan tunjangan lebaran. Jumlah rois sebanyak 17 orang.

- d. Karang taruna memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan potensi generasi muda. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, karena keberadaan dan aksi nyata dari karang taruna sangat dibutuhkan dimasyarakat.



- e. Prasarana olahraga yang pada dasarnya merupakan sesuatu bersifat permanen. Kelangsungan proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan tidak terlepas dari tersedianya prasarana olahraga yang baik dan memadai. Prasarana yang baik dan memadai maka proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Prasarana olahraga adalah sesuatu yang merupakan penunjang terlaksananya suatu proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan



- f. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan kalurahan dengan pembinaan LPMKal, PKK dan RT/RW. Pemerintah kalurahan memberikan perhatian bagi lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagai mitra dalam penyelenggraan pemerintah kalurahan. Untuk itu



kepada LPMKal, PKK diberikan dana operasional dalam bentuk kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaganya. LPMKal kalurahan telah terbentuk dengan kepengurusan yang masih aktif, sedangkan di masing-masing padukuhan di 12 padukuhan sudah terbentuk sub unit LPMKal padukuhan. Lembaga PKK terbentuk dengan kepengurusan lengkap dan masing-masing padukuhan juga terbentuk kepengurusan PKK padukuhan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan pembinaan dan operasional LPMKal sebesar Rp 7.250.000,00 dengan realisasi Rp1.200.000,00. Alokasi untuk kegiatan pembinaan dan operasional PKK sebesar Rp 17.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.200.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dan diimplementasikan melalui kegiatan :

- a. Ketersediaan air untuk mendukung budidaya tanaman dapat berasal dari hujan maupun irigasi, tetapi pada saat ketersediaan air hujan terbatas maka irigasi menjadi tulang punggung kegiatan pencapaian produksi tanaman. Keberadaan irigasi akan sangat mendukung rantai produksi tanaman dari mulai tumbuh sampai berproduksinya tanaman. Dengan demikian tanpa adanya sistem irigasi yang memadai maka sistem produksi pangan tidak dapat berjalan secara maksimal.
- b. Menjaga lapangan olahraga agar tidak cepat rusak adalah hal penting untuk memastikan keamanan para pemain, memperpanjang umur lapangan, dan menjaga kualitas bermain yang optimal. Maka dari itu pemeliharaan lapangan sangat diperlukan. Selain itu agar lapangan juga terlihat lebih rapi dan tertata.
- c. Pembinaan dan pelatihan kelompok tani. Melakukan pertemuan rutin tiap lapangan dan diikuti oleh pengurus kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan untuk membahas tentang kemajuan dalam bidang pertanian serta penanganan masalah hama.
- d. Penanggulangan kemiskinan. Data kemiskinan di Kalurahan Margokaton tercatat sebanyak 4432 orang terdiri dari KKM dan KRM. Selain itu kepada kelompok ini juga diberikan prioritas untuk dapat menyewa tanah kas kalurahan untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian seperti untuk lahan pencaharian.
- e. Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi. Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- f. Tujuan dari ekonomi produktif ini yaitu memampukan masyarakat guna mendefinisikan dan memenuhi kebutuhannya. Proses pelaksanaannya melibatkan kegiatan dan kerjasama kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pelaksanaan ekonomi produktif ini adalah bentuk dari pemberdayaan komunitas adat terpencil yang disisi lain merupakan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada usaha kecil atau biasa disebut ekonomi rakyat.



5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- a. Dengan adanya covid 19 Pemerintah Kalurahan Margokaton memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga kurang mampu dan terdampak langsung pandemic yang berjumlah 80 kepala keluarga dan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024.



b. Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Realisasi APBDes Tahun 2024

		Nominal
Pendapatan Desa	Rp	5.492.359.409,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.914.497.076,56
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.126.243.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	223.867.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	699.915.640,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	182.800,000,00
Jumlah Belanja Desa Tahun 2024	Rp	5.147.323.816,56
Surplus/Defisit	Rp	345.035.592,44
Pembiayaan	Rp	626.597.948,11
Silpa Tahun Berjalan	Rp	971.633.540,55

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan tahun 2024 kami sampaikan kepada warga masyarakat pada umumnya dan warga kalurahan Margokaton pada khususnya, dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang lebih baik. Tanggapan dan masukan tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan Margokaton. Kami menyadari masih terdapat kegiatan dibidang kewenangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah kalurahan (RPJMKal) yang telah disepakati bersama.

Kegiatan di bidang kewenangan yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik pemerintah kalurahan, BPKal, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kalurahan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Margokaton,
Lurah Margokaton X
Anggit Bimanyu

The image shows a circular official stamp of the Margokaton Sub-district Government. The text around the border of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON" at the top and "MARGOKATON" at the bottom. In the center of the stamp, the words "LURAH MARGOKATON" are printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, extending from the right side towards the center.